



336.076

TP 9

14

## **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**

**Nomor 1**

**Tahun 1994**

**Seri B**

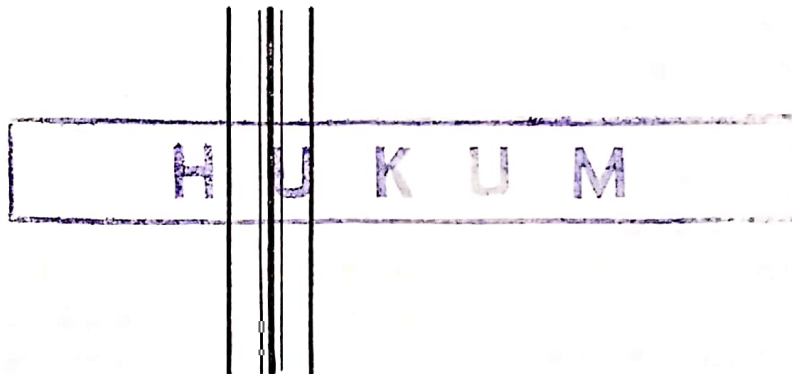
**No. Seri 1**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**

**Nomor 8 Tahun 1993**

#### **T E N T A N G**

**Trayek dan Izin Trayek Kendaraan Bermotor Penumpang Umum  
dan Kendaraan Bermotor Barang Umum Dalam Wilayah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan**



#### **BAGIAN HUKUM**

**Setwilda Tingkat II Hulu Sungai Selatan**

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI.II  
HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN              1993  
TENTANG

TRAYEK DAN IZIN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR  
PENUMPANG UMUM DAN KENDARAAN BERMOTOR BA  
RANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI  
SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali arus pengangkutan penumpang umum dan barang umum dalam Daerah guna memper lancar dan meningkatkan pembinaan terhadap pengusaha/supir angkutan pedesaan disamping sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Asli Daerah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1983 tentang Trayek dan Izin Trayek Mobil Penumpang Umum dan Mobil Barang Umum untuk angkutan pedesaan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan surat keputusan Nomor 003/SK-1/KUM dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati. II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1983 Seri C Nomor Seri 1 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan karenanya perlu ditinjau kembali ;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 - Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.95 /PR.301/PHB-84 tentang Pedoman Penyederha naan Perizinan Usaha disektor Perhubungan;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan - Darat Nomor L-1/1/11 Tahun 1986 tentang - Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Jajaran La lu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di- lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TRA YEK DAN IZIN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG UMUM DAN KENDARAAN BERMOTOR BARANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DA ERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

### B A B I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- b. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

- c. Trayek : adalah Jurusan/Lin jalan untuk beroperasinya kendaraan bermotor penumpang umum atau kendaraan bermotor barang umum dalam Daerah dengan keputusan Kepala Daerah ;
- d. Izin Trayek : adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk keperluan dapat beroperasinya kendaraan bermotor penumpang umum atau kendaraan bermotor barang umum dalam Daerah dengan keputusan Kepala Daerah ;
- e. Kendaraan bermotor : adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- f. Kendaraan bermotor penumpang umum : adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang/orang dengan dipungut bayaran ;
- g. Kendaraan bermotor barang umum : adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang dipergunakan untuk mengangkut barang dengan dipungut bayaran.

## B A B II

### TRAYEK, IZIN TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN

#### Pasal 2

Trayek serta jumlah kendaraan bermotor penumpang umum dan kendaraan bermotor barang umum yang beroperasi dalam Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor penumpang umum atau kendaraan bermotor barang umum yang dioperasikan dalam Daerah harus memiliki izin trayek.

- (2) Untuk mendapat izin trayek dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemilik kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor penumpang umum atau kendaraan bermotor barang umum yang akan dimintakan - izin trayek harus dimiliki oleh orang/Badan Hukum yang berdomisili dalam Daerah ;
  - b. Telah memiliki tanda bukti lunas uji serta surat-surat kelengkapan lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ;
  - c. Membayar biaya izin trayek untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut :
    - untuk kendaraan bermotor penumpang umum sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
    - untuk kendaraan bermotor barang umum jenis Pick up sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    - untuk kendaraan bermotor barang jenis Truck sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap pemindahan pemegang hak izin trayek harus terlebih dahulu mendapat izin Kepala Daerah, dengan kewajiban membayar biaya balik nama izin trayek sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Sistem pengoperasian yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Setiap kendaraan bermotor penumpang umum atau kendaraan bermotor barang umum yang melakukan pelanggaran izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) - pasal ini, kendaraan bermotor tersebut dapat ditahan sebagai barang bukti sampai masalah izin trayek diselesaikan oleh sipemilik kendaraan bermotor.

#### Pasal 4

- (1) Tarif angkutan kendaraan bermotor penumpang umum dan kendaraan bermotor barang umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor penumpang umum atau kendaraan bermotor barang umum tidak diperkenankan memungut bayaran melebihi dari tarif angkutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

#### B A B III

#### MASA BERLAKUNYA IZIN TRAYEK

#### Pasal 5

- (1) Izin trayek berlaku untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila izin trayek dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir, maka untuk perpanjangan izin trayek pemegang hak selambat-lambatnya 15 hari sebelumnya harus melaporkan dan memohon kembali kepada pihak yang berwenang memberi izin.
- (3) Apabila dalam masa berlakunya izin trayek dimaksud ayat (1) pasal ini :
  - a. terjadi pemindahan hak dan atau rusak, maka pemegang hak yang bersangkutan harus melaporkan kepada pihak yang berwenang memberi izin, untuk dilakukan balik nama dan atau diganti dengan izin baru ;
  - b. terjadi surat izin hilang, maka selambat-lambatnya 15 hari sesudah izin itu hilang pemegang hak harus melaporkan kepada pihak yang berwenang memberi izin dengan dilengkapi surat keterangan dari Kepolisian setempat untuk diganti dengan yang baru.

- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku bagi penyelesaian ketentuan yang diatur dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.
- (5) Izin trayek tidak berlaku lagi atau dicabut karena:
  - a. masa berlakunya habis ;
  - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dalam izin ;
  - c. bertentangan dengan kepentingan umum.

## B A B IV

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal - ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah - Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh seseorang tersangka berhenti dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan :

- a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemeriksaan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B V

KETNTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1983 tentang Trayek Dan Izin Trayek Mobil Penumpang Umum dan Mobil Barang Umum dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 1 Nopember 1994

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Hulu Sungai se-  
latan.

Bupati Kepala Daerah Tingkat I  
Hulu Sungai Selatan,

Ketua,  
Cap dtt

Cap

dtt

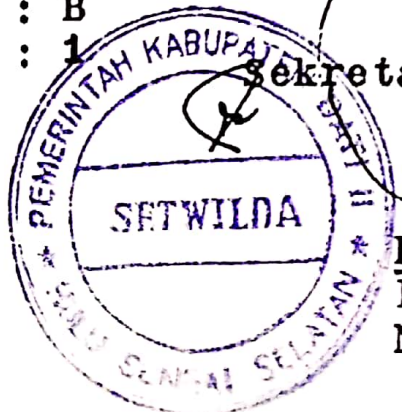
## S O E D A R N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu  
Sungai Selatan :

Nomor : 1  
Pada tanggal: 26 Maret 1994  
Tahun : 1994.  
Seri : B  
Nomor Seri : 1

Drs.H.SAIDUL HUDARIE  
Disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
dengan Surat Keputusan:  
Tanggal: 17 Januari 1994  
Nomor : 05/SK-1/KUM.

Sekretaris Wilayah/Daerah,



Drs.H.M.ARSYAD.  
Pembina Tk.I  
NIP.010 045 675.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

